

## Berita Lingkungan Hidup

### DKI tak Punya TPA Sampah Sendiri

JAKARTA -- Setiap hari sampah warga Jakarta diperkirakan sebanyak 6.735 ton. Volume sampah DKI Jakarta ini dinilai sudah melebihi volume Candi Borobudur yang hanya 55 ribu meter kubik.

Ironisnya, kata Pakar Teknologi Lingkungan Universitas Indonesia, Firdaus Ali, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki *dump station* atau tempat pembuangan akhir (TPA) sendiri atas ribuan ton sampah yang diproduksi setiap hari. "Hingga kini, Jakarta masih menggantungkan diri pada TPA yang berada di Bekasi, Tangerang, dan Bogor," ujar Firdaus, di Jakarta, Selasa (29/9).

Parahnya lagi, Firdaus menambahkan, satu-satunya TPA yang bisa digunakan oleh Jakarta hanya Bantargebang, Bekasi. Hal ini dikarenakan, perencanaan pembuangan sampah ke TPA Ciangir, Tangerang, baru sebatas *memory of understanding* (MoU) yang hingga kini bahkan masih belum jelas soal tindak lanjutnya, sedangkan untuk TPA Bojong dan Galuga, Bogor, hingga kini masih terhenti karena warga sekitar menolak.

Sampah yang dibuang ke TPA Bantargebang hanya sekitar 72 persen dari keseluruhan sampah yang diproduksi Jakarta setiap harinya atau sebesar 4.850 ton saja, sisanya yang 1.886 ton tersebar begitu saja di sembarang tempat, memenuhi saluran air, sungai, dan jalan-jalan. "Akibatnya, bila musim hujan tiba, menurut Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, setidaknya sekitar 76.383 meter kubik sampah diangkut setiap hari dari sejumlah sungai yang mengalir di Jakarta," beber Firdaus.

#### Tinjau kembali

Penjelasan Firdaus ini dipertegas kembali *Outreach Services* Dana Mitra Lingkungan, Maryanto. Menurut Maryanto, Jakarta sebagai daerah otonom seharusnya secara otonomi mampu mengatasi sampahnya sendiri.

Penyusunan kebijakan dalam pengelolaan sampah DKI ini tidak sejalan dengan *master plan* pengelolaan sampah yang tertulis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010. "Selama ini, penanganan sampah DKI hanya sebatas memindahkan timbunan sampah yang diproduksi ke Bantargebang. Hingga kini, belum ada penanganan yang benar-benar efektif bagi masalah sampah ini," papar Maryanto.

Firdaus Ali dan Maryanto, sama-sama menegaskan perlu ada peninjauan kembali masalah tata ruang terkait habisnya lahan Jakarta dijadikan gedung-gedung pencakar langit. Namun, untuk pembuangan sampah Jakarta harus memakai lahan milik daerah lain.

Yang terutama perlu ditinjau kembali adalah masalah RTRW. Salah satunya mengenai moratorium pembangunan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. "Tidak seharusnya kota yang dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi seperti Jakarta, tapi tidak memiliki TPA sendiri, dan sampah-sampahnya masih harus tersebar di jalan-jalan dan saluran air," ujar Maryanto. c16

### **Jalur pendakian ditutup**

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan, semua jalur pendakian di kawasan hutan gunung milik Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah ditutup selama menjelang perayaan kemerdekaan RI, 17 Agustus.

Hal itu disampaikan Kepala Perum Perhutani Unit I Jateng Heru Siswanto di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Senin.

Menurut Heru, dari beberapa kasus kebakaran hutan gunung, sering kali kebakaran disebabkan oleh kelalaian para pendaki yang meninggalkan api unggun. Beberapa hutan gunung yang sering terbakar adalah Gunung Sin-